

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Fungsi perbankan sangat penting dalam upaya suatu negara untuk memajukan pembangunan ekonomi, karena bank dan lembaga keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hampir setiap aspek kehidupan. Menurut Kasmir (2016), bank adalah lembaga komersial yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian memberikan pinjaman atau jenis bantuan keuangan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan penting adalah BPR.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariah. Namun, BPR tidak memberikan layanan yang terkait dengan transaksi pembayaran. Ruang lingkup kegiatan BPR lebih terbatas dibandingkan dengan kegiatan bank pada umumnya karena adanya larangan menerima simpanan giro, melakukan transaksi mata uang asing, dan memberikan layanan perasuransian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi dan mengatur kegiatan BPR di Indonesia. Pengawasan ini mencakup unsur-unsur seperti kepatuhan terhadap peraturan, mitigasi risiko, dan pemeliharaan stabilitas keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan tersebut tidak hanya menjamin keamanan dan kepercayaan nasabah, tetapi juga menjaga integritas sistem keuangan dalam negeri. BPR memiliki kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga lain, pemerintah daerah, atau organisasi lain

dalam rangka memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan pengaruhnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Sebagai lembaga keuangan yang mengkhususkan diri dalam menyalurkan pinjaman kepada perusahaan kecil dan mikro, BPR menyediakan layanan keuangan ke daerah-daerah yang mungkin kurang terlayani oleh bank-bank tradisional. Ini termasuk petani, usaha skala kecil, dan pengusaha mikro yang memberikan dukungan mendasar bagi perekonomian di daerah pedesaan. BPR meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal dengan berfungsi di tingkat lokal. Studi Widianingsih (2022) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan sub-sektor perbankan yang terdaftar di BEI dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan kredit bermasalah. Penyaluran kredit memiliki dampak yang menguntungkan pada kinerja keuangan sub-sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Kredit bermasalah memiliki dampak yang cukup besar pada kinerja keuangan bank-bank yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, pelaksanaan penyaluran kredit ini sangat penting untuk mengatasi masalah di tingkat daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Wafaretta (2021), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Pertama, BPR tidak menyediakan layanan pembayaran, tetapi lebih berkonsentrasi pada pemberian kredit kepada masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, pembiayaan properti, dan kebutuhan konsumen lainnya. Kedua, BPR memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan dananya pada instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

dan simpanan BPR. Ketiga, BPR tidak menerima giro, tidak melakukan kegiatan valuta asing, atau menyediakan layanan asuransi. Keempat, BPR mengutamakan pemberian layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat pedesaan, termasuk layanan penjangkauan, aplikasi inti perbankan khusus BPR, dan layanan 24 jam. Selain itu, BPR berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Selain itu, BPR terutama beroperasi di tingkat lokal dan berfokus pada pemberian layanan keuangan kepada masyarakat. Terakhir, BPR menggunakan sistem digital untuk memudahkan akses layanan keuangan bagi individu yang tinggal di daerah terpencil.

Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan, BPR di Indonesia semakin berusaha untuk memanfaatkan inovasi ini guna meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung transformasi digital. Langkah-langkah ini termasuk penggunaan sistem perbankan digital, pembayaran elektronik, dan strategi lainnya yang dapat membantu BPR menjawab tuntutan zaman serta memperluas dampak positifnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso bahwa pihaknya terus mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar cepat mengimplementasikan digitalisasi. Wimboh bahkan menyebut, terdapat 2 kendala penerapan digitalisasi di BPR yakni lokasi yang terpencil hingga kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di BPR. “BPR kecil-kecil dan letaknya jauh. Bahkan karena ukurannya terlalu kecil lalu pengurusnya tidak terlalu paham (teknologi),” kata Wimboh dalam webinar

OJK dan Keamanan Dana Masyarakat secara virtual, Senin 15 Maret 2021. Dengan kemajuan teknologi tersebut tentunya berpengaruh terhadap alur dan kinerja keuangan yang ada pada BPR itu sendiri.

Ada fenomena yang menarik terjadi pada beberapa BPR di Provinsi Bali, yaitu adanya fluktuasi pencapaian ROA pada tahun 2022 seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pencapaian ROA pada Beberapa BPR Konvensional di Provinsi Bali Tahun 2022

No.	Nama BPR	Periode	ROA (%)	Standar ROA (%)	Pencapaian	Kondisi
1	PT. BPR Sinar Putra Mas Klungkung	Maret	0,07	1,5	Belum Tercapai	Mengalami fluktuasi
		Juni	0,11	1,5	Belum Tercapai	
		September	0,67	1,5	Belum Tercapai	
		Desember	0,53	1,5	Belum Tercapai	
2	PT. BPR Indra Buleleng	Maret	0,31	1,5	Belum Tercapai	Mengalami fluktuasi
		Juni	0,74	1,5	Belum Tercapai	
		September	1,06	1,5	Belum Tercapai	
		Desember	1,41	1,5	Belum Tercapai	
3	PT. BPR Adi Sedana Ayu Jembrana	Maret	-1,05	1,5	Belum Tercapai	Mengalami fluktuasi
		Juni	0,17	1,5	Belum Tercapai	
		September	0,74	1,5	Belum Tercapai	
		Desember	0,02	1,5	Belum Tercapai	
4	PT. BPR Daerah Bangli	Maret	0,41	1,5	Belum Tercapai	Mengalami fluktuasi
		Juni	0,80	1,5	Belum Tercapai	
		September	0,87	1,5	Belum Tercapai	
		Desember	1,7	1,5	Tercapai	
5	PT BPR Bank Bunga Sutra Mas Tabanan	Maret	0,53	1,5	Belum Tercapai	Mengalami penurunan
		Juni	2,0	1,5	Tercapai	
		September	2,81	1,5	Tercapai	
		Desember	2,95	1,5	Tercapai	
6	PT. BPR Cahaya Artha Bali	Maret	-0,09	1,5	Belum Tercapai	Mengalami fluktuasi
		Juni	1,34	1,5	Belum Tercapai	
		September	1,90	1,5	Belum Tercapai	
		Desember	1,49	1,5	Belum Tercapai	
7	PT. Mitra Bali Artha Karangasem	Maret	0,17	1,5	Belum Tercapai	Mengalami fluktuasi
		Juni	0,47	1,5	Belum Tercapai	
		September	0,62	1,5	Belum Tercapai	
		Desember	0,83	1,5	Belum Tercapai	
8	PT. BPR Sukawati PancaKanti Gianyar	Maret	0,39	1,5	Belum Tercapai	Mengalami fluktuasi
		Juni	0,25	1,5	Belum Tercapai	
		September	0,12	1,5	Belum Tercapai	
		Desember	1,16	1,5	Belum Tercapai	

No.	Nama BPR	Periode	ROA (%)	Standar ROA (%)	Pencapaian	Kondisi
9	PT Pedungan Denpasar	Maret	0,87	1,5	Belum Tercapai	Mengalami fluktuasi
		Juni	0,20	1,5	Belum Tercapai	
		September	0,54	1,5	Belum Tercapai	
		Desember	0,71	1,5	Belum Tercapai	

Sumber: Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional pada www.ojk.go.id

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali, seperti halnya BPR di daerah lain di Indonesia, mungkin menghadapi kesulitan tertentu yang umum terjadi di industri perbankan. Kekhawatiran yang umum terjadi di industri keuangan adalah risiko kredit, yang bergantung pada kualitas peminjam dan kapasitas mereka untuk membayar kembali pinjaman. Memastikan stabilitas keuangan BPR memerlukan pendekatan menyeluruh terhadap manajemen risiko, yang mencakup masalah kredit, likuiditas, dan operasional. Kepatuhan yang ketat terhadap undang-undang perbankan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk menjaga kredibilitas industri keuangan. Lebih jauh, BPR di Bali dihadapkan pada tugas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini dan mengalokasikan sumber daya untuk sistem dan infrastruktur baru, sebagai hasil dari kemajuan dalam teknologi dan inovasi keuangan.

Pembiayaan berkelanjutan dan transformasi digital juga menjadi fokus, di mana BPR perlu merancang strategi yang bijak untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal sambil memanfaatkan peluang transformasi digital. Oleh karena itu, BPR di Bali perlu terus memantau dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi, regulasi, dan tren industri keuangan untuk tetap relevan dan berdaya saing. Menurut Sahabuddin dan Amelia Rahman (2022), mengemukakan Risiko kredit (*credit risk*) didefinisikan sebagai risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur dalam memenuhi

kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali hutangnya. Risiko kredit timbul dari adanya kemungkinan bahwa kredit yang diberikan oleh bank tidak dapat dibayarkan kembali.

Menyalurkan dana dalam bentuk kredit berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun bank melalui simpanan masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Untuk mengetahui keberlanjutan Bank dalam pengelolaan keuangan, kinerja keuangan harus diketahui penyaluran uang pada seluruh rakyat berupa piutang ataupun dipinjamkan dilakukan oleh bank dimana merupakan lembaga keuangan berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Pada penelitian yang dilakukan oleh Widianingsih dan Cipta (2023), menyatakan bahwa Penyaluran kredit dan kredit bermasalah berdampak positif juga signifikan pada kinerja. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Ensa Yusna, dkk (2023), menyatakan bahwa LDR dan CSR secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan,

BPR harus menghadapi masalah manajemen risiko kredit dalam menghadapi fluktuasi pasar dan situasi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Kredit yang buruk dapat memengaruhi stabilitas keuangan BPR secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan manajemen risiko kredit yang baik untuk mempertahankan kinerja keuangan yang kuat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ensa Yusna et al. (2023), ditetapkan bahwa kredit bermasalah (NPL) memiliki dampak yang merugikan pada kinerja keuangan. Namun, ditemukan bahwa rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, baik secara individu maupun kolektif. Menurut penelitian

Anam (2018), telah ditunjukkan bahwa NPL memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan, khususnya pada pengembalian atas aset (ROA).

Efisiensi operasional juga memainkan peran penting dalam kinerja keuangan BPR. Bagaimana BPR mengelola sumber daya mereka, termasuk personel dan teknologi, dapat mempengaruhi biaya operasional dan, pada gilirannya, profitabilitas mereka. Efisiensi Operasional atau yang lebih dikenal dengan rasio Beban Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Setiap peningkatan rasio Beban Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam mengelola usahanya (Nurkhalifa, dkk, 2021). Selain itu, Nurkhalifa, dkk (2021) menjelaskan dalam penelitiannya yang menemukan bahwa variabel efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan umum konvensional yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Semakin rendahnya rasio BOPO maka dengan begitu dapat meningkatkan ROA bank. Sebaliknya pada penelitian Muamilah dan Jannah (2020), menyatakan bahwa Adanya pengaruh positif dan signifikan yang dapat dilihat pada tabel 6 sebesar 0,0036 pada nilai probabilitas, dimana lebih kecil dari 0,05 nilainya, sehingga ini menyebabkan variabel pada X2 yaitu efisiensi operasional terhadap variabel Y yaitu kinerja keuangan.

Sementara itu, kecukupan modal menjadi landasan bagi BPR dalam menghadapi tantangan eksternal dan memperluas kapasitas penyaluran kreditnya. Dengan modal yang cukup, BPR dapat memitigasi risiko, mengatasi kerugian, dan memperkuat ketahanan mereka terhadap guncangan ekonomi. Kecukupan modal

merupakan suatu peraturan perbankan yang memutuskan bagaimana bank harus menangani aspek permodalan mereka (Assa dan Loindong, 2023). Tingkat kecukupan modal bank dapat dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Menurut Aprianti, dkk, (2021), pada penelitiannya menjelaskan kecukupan modal (CAR) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar yang terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan bahwa BPR belum mampu mengelola modalnya dengan baik, karena sebagian besar kredit yang diberikan kepada nasabah berasal dari modal BPR. Sehingga risiko kredit yang ditanggung semakin tinggi dan mengakibatkan kemampuan BPR dalam menghasilkan laba cenderung menurun. Sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Ilhami (2023), kecukupan modal (CAR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Analisis laporan keuangan adalah proses pemeriksaan laporan keuangan untuk meningkatkan signifikansinya dan memudahkan pemahaman oleh berbagai pemangku kepentingan. Analisis laporan keuangan akan memberikan wawasan tentang kekuatan dan kekurangan organisasi. Menurut Kasmir (2016), kinerja manajemen akan dievaluasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Profitabilitas adalah ukuran kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio ini juga dapat berfungsi sebagai indikator tingkat efisiensi yang ditunjukkan oleh manajemen perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh keuntungan finansial yang diperoleh dari penjualan dan pendapatan yang diperoleh dari investasi. Tujuan penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan kemandirian perusahaan (Kasmir, 2016).

Rasio profitabilitas dan lebih ke spesifik yaitu *Return On Asset* (ROA). karena ROA merupakan variabel yang biasa digunakan sebagai alat ukur untuk melihat kinerja keuangan suatu bank. ROA merupakan perbandingan dari laba bersih perusahaan dengan aset yang dimilikinya. Laba merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Maka semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode akuntansi dapat mengindikasikan kinerja perusahaan semakin baik (Riyadi, 2017).

Kinerja keuangan suatu bank juga mencerminkan tingkat kesehatan bank tersebut. Dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbs disebutkan penilaian tingkat kesehatan bank dipengaruhi oleh faktor CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Aspek *Capital* meliputi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), aspek *Asset Quality* meliputi *Non Performing Financing* (NPF), aspek *Earnings* meliputi *Return On Equity, Return On Asset*, dan *Operational Efficiency Ratio* (BOPO), dan aspek *Liquidity* meliputi *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada penggunaan variabel penelitian yang dimana menggunakan empat variabel penelitian yaitu penyaluran kredit, efisiensi operasional, risiko kredit, dan kecukupan modal. Alasan pemilihan variabel ini tentu saja berkaitan dengan fenomena yang terjadi di Bali, selain itu meneliti kinerja keuangan pada BPR sangatlah penting, karena BPR memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung sektor informal. BPR mendukung perekonomian dengan fokus pada memberikan kredit usaha, menciptakan

lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha, oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil maupun wawasan yang mendalam tentang dinamika yang melibatkan penyaluran kredit, efisiensi operasional, risiko kredit, dan kecukupan modal dalam konteks BPR se-Bali. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan arahan bagi BPR dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka, memperkuat sektor UMKM, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Bali. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh Penyaluran Kredit, Efisiensi Operasional, Risiko Kredit, dan Kecukupan Modal terhadap Kinerja Keuangan BPR Se-Bali”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Seperti yang kita ketahui bahwa BPR di Bali sangat banyak jadi banyak sekali hal yang dapat terjadi dan berpengaruh pada kinerja keuangannya.
2. Melihat pengaruh penyaluran kredit, efisiensi operasional dan risiko kredit serta kecukupan modal pada BPR yang sangat berpengaruh pada Bagaimana kinerja keuangan pada BPR itu sendiri.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan mengenai pengaruh penyaluran kredit, efisiensi

operasional, risiko kredit, dan kecukupan modal terhadap kinerja keuangan BPR Se-Bali.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah penyaluran kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah efisiensi operasional berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran kredit terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal terhadap kinerja keuangan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wacana, referensi, dan literatur di bidang akuntansi sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya maupun civitas akademika lain yang tertarik pada bidang yang sama. Penelitian ini juga digunakan untuk menguji teori-teori dalam kaitannya hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau bacaan ilmiah di perpustakaan dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah.
2. Bagi bank, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada bank untuk meningkatkan pencapaian ROA sehingga dapat memperkuat kinerjanya.
3. Bagi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pondasi bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana pada bank.

